

SIARAN PERS

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik

POLITIK ANTI-SAINS REZIM: KETIKA KEKUASAAN MENUNDUKKAN PENGETAHUAN

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mencermati pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan, *“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok,”* ketika menanggapi kritik dari kalangan yang disebutnya sebagai pakar. Presiden kemudian menyinggung pentingnya *intellectual honesty* dan menyatakan bahwa sebagian pakar telah menyampaikan apa yang ia sebut sebagai fitnah.

Bagi KIKA, persoalan utama dari pernyataan tersebut bukan semata-mata penggunaan kata yang kasar. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan memperlakukan pengetahuan, kepakaran, kritik ilmiah, dan kebebasan akademik ketika hasil pengetahuan tersebut tidak sejalan dengan preferensi politik pemerintah.

KIKA berpandangan bahwa dalam negara demokrasi, kepakaran tidak memperoleh legitimasi karena seorang akademisi selalu benar, sebagaimana kekuasaan juga tidak memperoleh legitimasi karena pemerintah selalu benar. Pengetahuan ilmiah bersifat terbuka terhadap kritik, koreksi, pembuktian ulang, dan perdebatan. Justru karena itulah kritik berbasis data dan metodologi tidak semestinya diperlakukan sebagai ancaman terhadap pemerintah.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Karena itu, pemerintah membutuhkan data, penelitian, evaluasi, bukti empiris, serta perdebatan terbuka untuk mengetahui apakah suatu kebijakan benar-benar mencapai tujuan yang diklaim.

Kesejahteraan rakyat tidak cukup dibuktikan melalui niat baik pemerintah. Ia harus dapat diuji melalui indikator, data, evaluasi kebijakan, dan pengalaman konkret masyarakat. Dalam konteks inilah kritik ilmiah memiliki fungsi demokratis. Akademisi, peneliti, jurnalis, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak kebijakan tidak harus menerima begitu saja narasi resmi pemerintah. Mereka memiliki hak untuk menguji klaim pemerintah melalui bukti yang tersedia.

Ketika kritik terhadap kebijakan dibalas dengan delegitimasi terhadap orang yang mengemukakan kritik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang akademisi. Yang dipertaruhkan adalah kualitas proses pengambilan keputusan publik.

Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan ilustrasi konkret mengenai pentingnya pendekatan berbasis bukti. Kebijakan publik, termasuk MBG, seharusnya didasarkan pada data dan kajian ilmiah, bukan semata-mata klaim mengenai niat baik pemerintah.

Kritik tersebut memperoleh relevansi karena insiden keracunan yang berkaitan dengan MBG telah berulang di berbagai daerah. Pada awal September 2026, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bahkan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG setelah kembali muncul laporan dugaan keracunan anak di sejumlah daerah. Pada Januari 2026, Menteri HAM juga menegaskan bahwa MBG harus memenuhi standar keamanan yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan setelah kasus keracunan di Mojokerto. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara terbuka menyatakan bahwa pelaksanaan MBG menghadapi banyak masalah dan masuk kategori gagal karena berbagai persoalan tak kunjung henti meski telah berjalan hampir dua tahun dengan anggaran besar.

Dengan demikian, persoalannya bukan apakah tujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak merupakan tujuan yang baik. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa tujuan yang baik tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang aman, efektif, dan berbasis pengetahuan. Dalam konteks tersebut, kritik dari pakar bukan gangguan terhadap program pemerintah. Kritik justru merupakan bagian dari mekanisme *quality control* dalam kebijakan publik.

Jika terdapat anak yang mengalami keracunan setelah menerima makanan dari program negara, pertanyaan ilmiah dan kebijakan yang harus diajukan adalah: apa penyebabnya, di mana kegagalan terjadi, bagaimana sistem pengadaan dan distribusi bekerja, bagaimana standar keamanan pangan diterapkan, dan apa yang harus diperbaiki? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan sumpah, retorika, atau klaim niat baik. Ia membutuhkan data, penelitian, investigasi, evaluasi, dan keterbukaan terhadap kritik

Pola pengabaian terhadap metodologi ilmiah dan kritik pakar ini tidak hanya terjadi dalam program sosial seperti MBG, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, pernyataan Presiden pada tahun 2024 mengenai pembukaan dan ekspansi perkebunan sawit serta pandangan bahwa pembukaan sawit tidak identik dengan deforestasi karena tanaman sawit memiliki daun. Pernyataan semacam itu tidak dapat dibahas hanya melalui logika biologis sederhana mengenai apakah tanaman sawit memiliki daun atau tidak. Persoalan deforestasi berkaitan dengan perubahan tutupan dan fungsi hutan, sejarah penggunaan lahan, lokasi perkebunan, status kawasan, skala ekspansi, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya.

Ironisnya, pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022 telah menegaskan bahwa sawit bukan tanaman hutan. KLHK juga menyatakan bahwa praktik perkebunan sawit yang ekspansif, monokultur, dan non-prosedural di dalam kawasan hutan telah menimbulkan persoalan hukum, ekologis, hidrologis, dan sosial.

Dengan demikian, perdebatan mengenai sawit seharusnya dikembalikan kepada data dan bukti, bukan disederhanakan menjadi pertentangan antara pihak yang dianggap “pintar” dan pihak yang dianggap “goblok”.

Jika pemerintah memiliki data ilmiah terbaru yang menunjukkan kesimpulan berbeda, maka data tersebut harus dibuka, diuji, dan diperdebatkan secara terbuka. Inilah mekanisme ilmu pengetahuan bekerja.

KIKA mengingatkan bahwa negara tidak boleh memperlakukan sains secara selektif: menggunakan penelitian ketika mendukung kebijakan pemerintah, tetapi mengabaikannya ketika penelitian tersebut menghasilkan kritik..

KIKA juga memandang perlu mengingatkan pemerintah mengenai konsekuensi penggunaan pendekatan keamanan dalam konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ketika polisi dan militer ditempatkan untuk menjaga kepentingan produksi atau perkebunan, pemerintah harus memastikan bahwa kehadiran aparat tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi hak masyarakat yang menyampaikan keberatan, mempertahankan ruang hidupnya, atau memperjuangkan hak atas tanah.

Dalam konflik agraria, negara memiliki kewajiban untuk menjamin proses hukum yang adil dan perlindungan hak seluruh pihak. Pendekatan keamanan tidak boleh menggantikan mekanisme penyelesaian konflik yang transparan, partisipatif, dan berbasis hukum.

Karena itu, setiap kebijakan yang meningkatkan keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan perkebunan harus disertai mekanisme pengawasan publik, batas kewenangan yang jelas, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta jaminan bahwa kritik dan keberatan terhadap perusahaan maupun pemerintah tidak diperlakukan sebagai ancaman keamanan.

KIKA menggunakan istilah “politik anti-sains” untuk menunjuk pada kecenderungan politik ketika bukti ilmiah, kepakaran, dan proses pengujian pengetahuan kehilangan otoritasnya karena berhadapan dengan kepentingan atau narasi kekuasaan.

Dalam situasi demikian, persoalan kebebasan akademik menjadi sangat penting. Kebebasan akademik tidak hanya berarti kebebasan dosen untuk mengajar di ruang kelas atau peneliti untuk melakukan eksperimen di laboratorium. Kebebasan akademik juga mencakup kebebasan untuk menghasilkan pengetahuan, mengemukakan temuan, mempertanyakan kebijakan publik, berbeda pendapat dengan pemerintah, dan menyampaikan kritik berdasarkan argumentasi ilmiah tanpa intimidasi atau pembalasan politik.

Karena itu, ketika seorang presiden mendelegitimasi kelompok pakar secara terbuka sebagai respons terhadap kritik, masyarakat akademik patut mempertanyakan pesan politik yang muncul dari komunikasi tersebut.

Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk ketidaksetiaan kepada negara. Sebaliknya, dalam demokrasi, mengoreksi kekuasaan melalui pengetahuan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kewargaan dan intelektual.

KIKA juga menegaskan bahwa pembelaan terhadap sains tidak berarti memberikan kekebalan kepada akademisi. Ilmuwan dapat salah. Penelitian dapat memiliki keterbatasan. Data dapat diperbarui. Metodologi dapat diperdebatkan. Konflik kepentingan harus dibuka. Kesimpulan ilmiah dapat dikoreksi.

Namun mekanisme untuk menguji kesalahan tersebut adalah kritik ilmiah, verifikasi data, peer review, debat terbuka, dan pemeriksaan bukti—bukan penghinaan, intimidasi, pembungkaman, atau penggunaan otoritas politik untuk mendelegitimasi kepakaran. Justru karena sains dapat salah, kebebasan untuk mempertanyakan dan mengoreksi menjadi sangat penting.

Tekanan politik, sensor, politisasi pengetahuan, dan pengabaian atau pemelintiran temuan berbasis bukti dapat merusak institusi ilmiah. KIKA menyerukan agar komunitas ilmiah tidak diam menghadapi ancaman terhadap kebebasan ilmiah dan menekankan pentingnya mempertahankan hak untuk mencari serta menyampaikan kebenaran ilmiah.

Atas dasar tersebut, KIKA menyerukan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia, agar menjadikan data, penelitian, evaluasi, dan bukti ilmiah sebagai bagian fundamental dalam pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik komunikasi politik yang mendelegitimasi kepakaran hanya karena suatu temuan atau kritik tidak sesuai dengan posisi pemerintah.
2. Seluruh pejabat publik, agar membedakan kritik ilmiah dari serangan politik. Kritik berbasis bukti harus dijawab dengan bukti, bukan dengan delegitimasi terhadap orang yang menyampaikannya.
3. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian, agar mempertahankan independensi akademik, melindungi peneliti dan dosen yang menyampaikan temuan ilmiahnya, serta tidak menjadikan kepentingan politik sebagai ukuran kebenaran akademik.
4. Komunitas ilmiah dan akademisi, agar tidak menyerahkan ruang produksi pengetahuan kepada kekuasaan. Akademisi harus tetap terbuka terhadap kritik, transparan terhadap metode dan data, sekaligus berani menyampaikan temuan yang mungkin tidak menyenangkan bagi pemerintah.
5. Masyarakat sipil dan media, agar terus mengawal kebijakan publik melalui pemeriksaan data, verifikasi fakta, dan diskusi berbasis bukti.

KIKA menegaskan bahwa negara bukan pemilik kebenaran ilmiah. Pemerintah adalah salah satu pengguna pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan publik, sementara produksi dan pengujian pengetahuan harus tetap memiliki otonomi dari kekuasaan politik.

Karena itu, ketika kekuasaan mulai memandang kritik ilmiah sebagai musuh dan kepakaran sebagai sesuatu yang dapat dihina ketika berbeda dengan narasi pemerintah, masyarakat akademik tidak boleh menganggapnya sebagai persoalan retorika belaka.

Sebab ketika kekuasaan mulai menentukan mana pengetahuan yang boleh dipercaya berdasarkan kepentingan politik, yang terancam bukan hanya sains. Yang terancam adalah kebebasan akademik, kualitas kebijakan publik, dan demokrasi itu sendiri.

Salam kebebasan akademik!

Korespondensi :

HP Official KIKA: 082338397166

email: kebebasanakademik@gmail.com